

PENGARUH KEBIJAKAN HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH BERAS TERHADAP PENDAPATAN PETANI DI KECAMATAN WIDASARI KABUPATEN INDRAMAYU

Sephia Alayda Hasan^{1)*}, Ismannudin²⁾, Soleh³⁾

¹ Prodi. Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Wiralodra
phiaasa@gmail.com

² Prodi. Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Wiralodra
ismannudin@unwir.ac.id

³ Prodi. Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Wiralodra
soleh_fisip@unwir.ac.id

ABSTRAK

Beberapa petani di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, lebih memilih menjual hasil panen berasnya kepada tengkulak ketimbang pihak Bulog, hanya karena menginginkan harga jual yang sepadan bahkan lebih tinggi sesuai dengan biaya pengeluaran para petani. Selain itu, kendala lainnya pada keterbatasan akses ke Bulog, lambatnya proses serapan hasil panen, dan ketidaksesuaian waktu penyerapan dengan musim panen raya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana kebijakan HPP beras berpengaruh terhadap pendapatan petani serta seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Sampel penelitian ditentukan dengan rumus Cochran dan menghasilkan 53 responden petani padi di Kecamatan Widasari. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket dengan skala Likert, kemudian dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, regresi linier sederhana, uji t, dan uji koefisien determinasi dengan bantuan program SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,389 dan tingkat signifikansi 0,001 ($< 0,05$). Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel kebijakan HPP berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani, meskipun faktor lain seperti biaya produksi, luas lahan, dan akses pasar juga berperan penting. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan HPP beras berperan dalam menjaga stabilitas harga gabah/beras dan memberikan jaminan pendapatan yang lebih layak bagi petani. Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi kendala, seperti persyaratan kualitas Bulog yang ketat serta keterbatasan akses petani untuk menjual hasil panennya ke Bulog.

Kata kunci: Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah, Pendapatan, Petani, Beras

ABSTRACT

Some farmers in Widasari District, Indramayu Regency, preferred to sell their rice harvests to middlemen rather than the Bulog, just because they wanted a commensurate selling price or even higher according to the expenses of farmers. In addition, other obstacles to limited access to Bulog, the slow process of absorption of crops, and incompatibility of absorption time with the harvest season. The purpose of this study is to determine the extent to which the rice HPP policy affects the income of farmers and how much influence it caused. The method used in this study is a quantitative method with a causal associative approach. The research sample was determined by the Cochran formula and produced 53 rice farmers respondents in Widasari District. Data collection techniques are carried out through the distribution of a questionnaire with a Likert scale, then analyzed using validity, reliability, simple linear regression tests, T tests, and the coefficient of determination with the assistance of the SPSS version 26 program. This is evidenced by the regression coefficient value of 0.389 and a significance level of 0.001 (<0.05). The value of the coefficient of determination (R^2) shows that the HPP policy variable contributes to increasing farmers' income, although other factors such as production costs, land area, and market access also play an important role. The conclusion of this study is that the rice HPP policy plays a role in maintaining the stability of grain/rice prices and providing a more suitable revenue guarantee for farmers. However, the implementation of this policy in the field is still facing obstacles, such as strict Bulog quality requirements and limited access to farmers to sell their crops to Bulog.

Keywords: *Government Purchase Price Policy, Income, Farmer, Rice*

Submisi: 07-07-2025
Diterima: 09-07-2025
Dipublikasikan: 08-08-2025

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor utama dalam perekonomian Indonesia yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Beras sebagai komoditas strategis memiliki peranan vital, sehingga pemerintah menerapkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk menjamin stabilitas harga di tingkat petani. Kabupaten Indramayu merupakan salah satu lumbung padi terbesar di Jawa Barat dengan kontribusi signifikan terhadap produksi beras nasional. Namun, meskipun kebijakan HPP telah diberlakukan, petani masih menghadapi ketidakpastian pendapatan akibat fluktuasi harga dan kenaikan biaya produksi. Kondisi ini menjadi dasar urgensi penelitian mengenai efektivitas kebijakan HPP beras terhadap pendapatan petani di Kecamatan Widasari..

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu sentra produksi padi terbesar di Provinsi Jawa Barat, bahkan secara nasional. Wilayah ini dikenal sebagai lumbung padi karena memiliki lahan sawah yang luas, sistem irigasi teknis yang cukup baik, serta didukung oleh mayoritas penduduk yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, khususnya budidaya padi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indramayu (2023), luas panen padi sawah di Indramayu mencapai sekitar 176.000 hektare dengan produksi lebih dari 1,2 juta ton GKG (Gabah Kering Giling) per tahun. Dengan angka tersebut, Indramayu menjadi kabupaten dengan kontribusi terbesar terhadap produksi beras di Jawa Barat dan salah satu yang tertinggi di Indonesia.

Penentuan HPP oleh Pemerintah bertujuan sebagai jaring pengaman harga sekaligus instrumen pengendali pasar. Dengan menetapkan harga beli gabah pada tingkat yang relatif tinggi, pemerintah mendorong petani untuk meningkatkan produksi, serta menjamin adanya pasar yang pasti untuk hasil panen mereka. Selain itu, kebijakan ini juga berfungsi untuk menghindari potensi penyimpangan seperti penimbunan, penyaluran tidak resmi, atau bahkan ekspor ilegal, yang dapat mengganggu stabilitas pasokan dalam negeri.

Implementasi kebijakan HPP beras dalam beberapa tahun terakhir, di Kabupaten Indramayu menimbulkan berbagai respons dari petani. Beberapa pihak menilai kebijakan ini cukup membantu dalam menstabilkan harga, sementara yang lain menganggapnya kurang efektif karena harga yang ditetapkan belum sepenuhnya mengakomodasi biaya produksi yang terus meningkat. Studi oleh Wastra dan Dalhar, (2021) menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat memberikan dampak yang signifikan apabila disertai dengan regulasi yang lebih ketat dan distribusi yang lebih efisien.

Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perbadan 6 Tahun 2023 sebagai hukum yang mengatur HPP (Harga Pembelian Pemerintah) gabah dan beras. Peraturan ini mengatur HPP gabah dan beras untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dan ditetapkan sebesar Rp. 6.500/Kg, sementara Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan sebesar Rp. 6.300/Kg, dan beras medium di gudang Bulog sebesar Rp. 9.950/Kg.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, bahwa masih ada beberapa petani yang memilih menjual hasil panennya khususnya beras, tidak ke pihak Instansi Pemerintahan dalam hal ini Bulog. Hal itu, dikarenakan menginginkan harga jual yang sepadan bahkan lebih tinggi sesuai dengan pengeluaran yang telah petani kelola. Selain faktor harga, faktor sosial ekonomi juga memainkan peran penting dalam efektivitas

kebijakan ini.

Hasil penelitian oleh Rozci dan Inti, (2024), menunjukkan bahwa struktur distribusi gabah dan beras di sentra produksi Indonesia dari produsen (petani) sampai ke konsumen akhir menunjukkan pola yang relatif stabil dalam perbedaan harga beras menurut tahapan dalam rantai pasar. Ini menunjukkan bahwa pelaku distribusi terdiri dari banyak rantai pasok dengan skala kegiatan dan luasan jaringan yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan HPP dan HET gabah dan beras harus dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan harga yang terjadi sepanjang musim, karena harga keduanya berbeda setiap musim.

Carl J. Friedrich (1963: 79), mendefinisikan kebijakan yaitu *Policy is a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy is proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose*. Dapat dimaknai bahwa, kebijakan merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang menghadirkan hambatan dan peluang, di mana kebijakan itu diusulkan untuk memanfaatkannya maupun mengatasinya dalam rangka mencapai tujuan atau maksud tertentu.

Pengertian kebijakan tersebut di atas, memaksudkan bahwa dalam suatu kebijakan tidak hanya sebagai keputusan semata, melainkan juga kebijakan dapat disebut sebagai rangkaian tindakan yang dipengaruhi oleh lingkungan. Selain itu, dalam suatu kebijakan selalu diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan HPP seharusnya mampu memberikan peluang bagi para petani beras guna meningkatkan pendapatan mereka.

Soekartawi (2002:45), mendefinisikan bahwa pendapatan usaha tani diperoleh dengan cara menghitung selisih antara total penerimaan dengan total biaya produksi, baik biaya tetap maupun variabel. Oleh karena itu, dalam suatu pendapatan dapat ditetapkan jika telah dihitung setelah semua biaya dikurangkan dari penerimaan.

Analisis usaha tani menjadi sangat penting untuk memahami sejauh mana kebijakan HPP memberikan dampak yang positif atau yang baik terhadap keuntungan petani. Usaha tani merujuk pada seluruh kegiatan produksi pertanian yang mencakup penggunaan input (seperti benih, pupuk, tenaga kerja), proses budidaya, hingga hasil panen. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengukur secara konkret hubungan antara biaya produksi, hasil panen, dan harga jual yang diterima petani. Sebagai contoh, seorang petani padi di Indramayu dengan luas lahan satu hektare mengeluarkan biaya produksi yaitu sekitar Rp. 15.000.000 per musim tanam. Komponen biaya tersebut meliputi pembelian benih, pupuk, pestisida, sewa lahan (jika ada), dan tenaga kerja. Jika petani tersebut mampu menghasilkan 6 ton GKP (Gabah Kering Panen), dan dijual dengan harga HPP yaitu sebesar Rp. 5.000/Kg, maka pendapatan kotor yang diperoleh adalah Rp. 30.000.000. Setelah dikurangi biaya produksi, keuntungan bersih petani mencapai sekitar Rp. 15.000.000 per musim.

Jika harga beras yang ada di pasar berada di bawah HPP, maka kebijakan ini menjadi penopang penting agar petani tetap memperoleh pendapatan layak. Sebaliknya, jika harga pasar lebih tinggi dari HPP, petani memiliki fleksibilitas untuk menjual ke pasar bebas demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Implementasi kebijakan ini di

lapangan sering kali tidak berjalan optimal. Beberapa kendala yang dihadapi petani mencakup keterbatasan akses ke Bulog, lambatnya proses serapan hasil panen, serta ketidaksesuaian waktu penyerapan dengan musim panen raya. Oleh karena itu, penguatan sistem distribusi, transparansi dalam pelaksanaan kebijakan, dan pemberdayaan kelembagaan tani sangat diperlukan agar HPP benar-benar menjadi instrumen perlindungan pendapatan petani. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana kebijakan HPP beras berpengaruh terhadap pendapatan petani di Kabupaten Indramayu. Analisis mendalam diperlukan untuk memahami apakah kebijakan ini benar-benar efektif atau masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki agar memberikan dampak yang lebih optimal bagi petani. Dengan adanya studi ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait perbaikan kebijakan HPP agar lebih mengakomodasi kebutuhan petani. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi akademisi yang tertarik dalam mengkaji kebijakan harga pangan dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif kausal (hubungan sebab akibat antar dua atau lebih variabel). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Seluruh petani padi yang berada di Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, yang terlibat langsung dalam kegiatan produksi dan penjualan gabah/beras yang terdampak oleh kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Beras. Teknik pengambilan sampel pada penelitian menggunakan *propotional random sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel acak di mana jumlah sampel yang diambil dari setiap kelompok (strata) dalam populasi ditentukan berdasarkan proporsi ukuran kelompok tersebut terhadap keseluruhan populasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi (pengamatan), kuesioner (angket) dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, analisis regresi linear sederhana, uji hipotesis menggunakan Uji Koefisien (Uji T) dan uji koefisien determinasi *R Square* (R²).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Widasari adalah bagian dari Kabupaten Indramayu di Jawa Barat, Indonesia. Ini terdiri dari 10 desa dan memiliki luas 6 km², dengan kepadatan penduduk sekitar 15.000 jiwa per km². Mayoritas penduduk di Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu bermata pencaharian di sektor pertanian khususnya Petani Padi. Para Petani tersebut di Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu adalah bagian dari komunitas agraris yang bertanggung jawab atas ketahanan pangan nasional. Para petani di Kecamatan Widasari mengelola lahan sawah yang subur, berkontribusi pada produksi padi nasional yang tinggi, dan memainkan peran penting dalam perekonomian lokal, (Sumber: Pemcam Widasari, 2025).

Data Gabah Kering Giling (GKG) di Kabupaten Indramayu Tahun 2024 yaitu mencapai 1,7 juta ton, dan atau mencapai 808.101,81 ton Beras di Tahun 2024. Sehingga,

dari hasil capaian tersebut mencatatkan Kabupaten Indramayu khususnya Kecamatan Widasari sebagai produsen beras tertinggi di Provinsi Jawa Barat, (Sumber: BPS Indramayu, 2025).

Hasil penelitian ini, terlebih dahulu diawali dari hasil uji validitas pada masing-masing variabel dalam penelitian ini. Pengujian tersebut didasari pada instrumen penelitian dalam hal ini kuesioner penelitian yang telah disebar kepada para responden. Berikut hasil pengujian validitas pada variabel X dan variabel Y, yaitu:

Tabel 1.
Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Variabel X

No.	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Corrected Item- Total Correlation	Status Item
1.	Kebijakan HPP Beras (X)	X1.1	0,454	Valid
		X1.2	0,481	Valid
		X1.3	0,353	Valid
		X1.4	0,426	Valid
		X1.5	0,821	Valid
		X1.6	0,326	Valid
		X1.7	0,419	Valid
		X1.8	0,356	Valid
		X1.9	0,794	Valid
		X1.10	0,288	Valid

(Sumber: Data primer yang diolah melalui SPSS v26, 2025)

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Variabel Y

No.	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Corrected Item- Total Correlation	Status Item
2.	Pendapatan Petani (Y)	Y1.2	0,410	Valid
		Y1.3	0,710	Valid
		X1.13	0,349	Valid
		Y1.4	0,377	Valid
		Y1.5	0,515	Valid
		Y1.6	0,460	Valid
		Y1.7	0,489	Valid
		Y1.9	0,501	Valid
		Y1.10	0,278	Valid

(Sumber: Data primer yang diolah melalui SPSS v26, 2025)

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah diuraikan pada Tabel tersebut di atas, terbukti bahwa seluruh item pernyataan yang tertuang dalam kuesioner penelitian dinyatakan valid. Hal ini ditandai dengan nilai *Corrected Item-Total Correlation* pada masing-masing pernyataan lebih besar dan tidak bernilai negatif terhadap nilai syarat minimum yang telah ditetapkan $r = 0,05$. Selanjutnya, setelah melakukan pengujian validitas pada kuesioner penelitian, juga dilakukan pengujian pada reliabilitas kuesioner. Berikut hasil uji reliabilitas sesuai dengan masing-masing variabel dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 3.
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

No.	Variabel Penelitian	Alpha Cronbach's	Alpha Toleransi	Status Item
1.	Kebijakan HPP Beras (X)	0,652	0,6	Reliabel
2.	Pendapatan Petani (Y)	0,666	0,6	Reliabel

(Sumber: Data primer yang diolah melalui SPSS v26, 2025)

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi standar syarat reliabilitas karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,6 ($\alpha \geq 0,6$). Sehingga kuesioner dapat digunakan untuk meneliti variabel yang hendak diteliti, hasil tersebut juga menggambarkan bahwa tingkat konsistensi berada di atas syarat yang ditentukan.

Tabel 4.
Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	73.679	1	73.679	12.381	.001 ^b
	Residual	303.491	51	5.951		
	Total	377.170	52			

a. *Dependent Variable*: Pendapatan Petani di Kecamatan Widasari
b. *Predictors*: (*Constant*), Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Beras

(Sumber: Data primer yang diolah melalui SPSS v26, 2025)

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil pengolahan melalui IBM SPSS Statistics 26.0, didapatkan nilai F hitung yaitu berjumlah 12.381 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,001 yang dapat diartikan hasil dari *output* tersebut $< 0,05$. Sehingga nilai regresi linier sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pada Pengaruh Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (X) Terhadap Pendapatan Petani (Y) di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Untuk melihat hasil nilai dari besaran pengaruh variabel X dan Y dalam penelitian ini, dapat dilihat pada hasil uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5.
Hasil Uji Koefisien (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(<i>Constant</i>)	12.379	2.558		4.839	.000
	Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Beras	.389	.110	.442	3.519	.001

a. *Dependent Variable*: Pendapatan Petani di Kecamatan Widasari

(Sumber: Data primer yang diolah melalui SPSS v26, 2025)

Berdasarkan *print out Coefficients* yang telah diperoleh dari hasil pengolahan melalui IBM SPSS Statistics 26.0, didapatkan nilai *Unstandardized Coefficients Beta* pada model (*Constant*) didapatkan nilai sebesar 12.379, koefisien regresi (β) 0,389 dengan probabilitas (*p*) 0,001. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika tidak ada Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (*Constant*), maka nilai Pendapatan Petani adalah sebesar 12.379 dan angka koefisien regresi (β) sebesar 0,389 mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% media Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah Beras, maka akan meningkatkan pendapatan petani sebesar skor 0,389. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Petani mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka hasil yang disimpulkan adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya bahwa, variabel Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Beras berpengaruh terhadap variabel Pendapatan Petani di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.

Tabel 6.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.442 ^a	.195	.180	2.43943
a. Predictors: (Constant), Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Beras				

(Sumber: Data primer yang diolah melalui SPSS v26, 2025)

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil pengolahan melalui IBM SPSS Statistics 26.0, didapatkan nilai Koefisien determinasi atau R Square adalah sebesar 0.195. Nilai tersebut didapatkan dari pengkuadratan nilai Koefisien Korelasi atau “R” yaitu $0.442 \times 0.442 = 0.195$. Tabel di atas menjelaskan bahwa nilai R Square adalah sebesar 0,195 (19,5%). Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang sangat rendah antara variabel Pengaruh Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Beras terhadap variabel Pendapatan Petani di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Sedangkan 80,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil Penelitian ini hasil perhitungan diketahui bahwa variabel independen (Kebijakan HPP) memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen (pendapatan petani). Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji regresi linier sederhana dimana didapatkan nilai F hitung yaitu berjumlah 12.381 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,001 yang dapat diartikan hasil dari output tersebut $< 0,05$. Sehingga nilai regresi linier sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) beras (X) Terhadap Pendapatan Petani (Y) di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.

Kemudian untuk melihat kebenaran hipotesis dilakukan uji koefisien (Uji T) dimana didapatkan nilai t hitung sebesar 3.519, koefisien regresi (β) 0,389 dengan probabilitas (*p*) 0,001. Hasil menunjukkan bahwa variabel pendapatan petani Mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka hasil yang disimpulkan adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya bahwa, variabel kebijakan harga pembelian pemerintah beras

berpengaruh terhadap variabel pendapatan petani di Kecamatan Kabupaten Indramayu. Kemudian untuk melihat kebenaran hipotesis dilakukan uji koefisien (Uji T) dimana didapatkan nilai t hitung sebesar 3.519, koefisien regresi (β) 0,389 dengan probabilitas (p) 0,001. Hasil menunjukkan bahwa variabel kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras terhadap variabel pendapatan petani terbukti memiliki pengaruh.

Hasil penelitian mengenai pengaruh kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras terhadap pendapatan petani di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel kebijakan HPP (X) dengan pendapatan petani (Y). Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan analisis ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar $12.381 \geq F$ tabel (3,11) dengan nilai signifikansi sebesar $0,01 \leq 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak, sementara hipotesis alternatif (H_1) diterima. Dengan demikian, terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara kebijakan HPP terhadap pendapatan petani. Temuan ini sekaligus mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa kebijakan HPP memiliki kontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani padi di Kecamatan Widasari.

Hasil regresi ini juga diperkuat oleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,195. Angka ini menunjukkan bahwa sebesar 19,5% adanya pengaruh yang sangat rendah antara variabel Pengaruh Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Beras terhadap variabel Pendapatan Petani. Sementara itu sisanya 80,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai koefisien R Square sebesar 0,466. Nilai ini mengindikasikan bahwa hubungan antara kedua variabel penelitian berada dalam kategori yang cukup. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 19,5% memperkuat temuan ini dengan menunjukkan seberapa rendah model regresi yang dibentuk oleh interaksi antara kebijakan HPP dan pendapatan petani. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,195 dapat diartikan bahwa variabel bebas mempunyai kontribusi sebesar 19,5% terhadap variabel terikat. Sedangkan 53,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka melalui konsep teori kebijakan ekonomi oleh Sukirno (2010:8), dapat dianalisis bahwa kebijakan HPP dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas harga pangan. Selain itu, dengan adanya penetapan harga dasar (*floor price*) sebagai jaminan pendapatan, maka dapat dikatakan kebijakan ini efektif melindungi petani, tetapi harus ditetapkan secara proporsional agar tidak menimbulkan distorsi pasar dan beban fiskal yang berlebihan.

Hasil penelitian pada variabel pendapatan, yang merujuk pada konsep teori pendapatan oleh Mubyarto (1989: 124), bahwa terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi pendapatan petani, yaitu luas lahan garapan, produktivitas lahan dan tenaga kerja, harga jual hasil pertanian, biaya produksi, dan kebijakan pemerintah. Sejalan dengan penelitian ini, terkait harga jual yaitu fluktuasi harga di pasar sangat menentukan tinggi rendahnya pendapatan petani. Selain itu, pada kebijakan Pemerintah tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) perlu dukungan penuh sesuai dengan ketentuan jika *Total Revenue*/Penerimaan Total (TR) lebih besar dari *Total Cost*/Biaya Total (TC) yang didapatkan oleh para petani di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.

Kebijakan ekonomi makro dalam hal ini kebijakan HPP harus berpihak pada kepentingan mikro, terutama pada pendapatan para petani, agar pembangunan ekonomi

tidak hanya mencetak angka pertumbuhan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan, kebijakan harga pembelian pemerintah kurang berpengaruh terhadap pendapatan petani di kecamatan Widasari kabupaten Indramayu. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F hitung \geq F table yaitu $12.381 \geq 3.11$ dengan nilai sig dari uji F sebesar 0,001 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditetapkan (0,05). Sebagian besar petani masih menjual hasil panennya kepada tengkulak, Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain persyaratan kualitas gabah/beras dari Bulog yang dinilai cukup ketat, keterbatasan titik serap Bulog yang tidak menjangkau seluruh desa, serta proses administrasi yang dianggap lebih rumit dibandingkan menjual ke tengkulak. Akibatnya, meskipun kebijakan HPP telah ditetapkan, tetapi tidak semua petani dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedrich, Carl J.. 1963. *Man and His Government*. New York: McGraw-Hill.
- Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Edisi Ke-tiga. Jakarta: LP3S.
- Rozci, F., dan Inti, R. W. 2024. Dampak dan Stabilitas Harga Terkait Kebijakan Harga Dasar dan Harga Atap untuk Padi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Agribisnis*. Volume 12, Nomor 2, hal. 136-148. DOI: <https://doi.org/10.33005/jimaemagri.v12i2.31>
- Soekartawi. 2002. *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. 2010. *Makroekonomi: Teori Pengantar*, Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wastra, A. R., dan Dalhar, A. 2021. Dampak Realokasi Subsidi Pupuk Menjadi Subsidi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Terhadap Pendapatan Petani. *Sharia Agribusiness Journal*, Volume 1, Nomor 2. hal. 169-194. DOI: <https://doi.org/10.15408/saj.v1i2.22724>